

Pengelolaan Sanitasi Pada Pemerintah Lokal: Studi Kasus Peningkatan Kelembagaan Prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kabupaten Ponorogo

Sanitation Management in Local Government: A Case Study of Institutional Improvement of the Sludge Treatment Plant in Ponorogo Regency

Mike Yuanita¹, Ismy Nur Syahbiba², Nanang Haryono³

¹Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

²Konsultan Individu Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur

³Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga, Surabaya

Corresponding author: nanang.haryono@fisip.unair.ac.id

Abstract

Sanitation management is an important part of sustainability in line with the Sustainable Development Goals (SDGs). For this reason, the Directorate General of Human Settlements (IPLT) has built an infrastructure for sewage treatment plants (IPLT) in an effort to increase public access to sanitation services. For optimal and sustainable IPLT, it is necessary to separate the functions of regulator and operator managing the sanitation sector through institutional development of the technical implementing unit (UPTD). The focus of the discussion of this article is on the analysis of the institutional development of the UPTD for the management of IPLT Infrastructure in Ponorogo Regency in 2021. The results of the research are that institutional development is running according to the SE Ministry of Home Affairs No 061/4338/OTDA concerning Consultation Guidelines for the Establishment of Branch Offices and UPTDs, however, in the consultation process for KA UPTD PALD Ponorogo Regency at the Bureau of Organization of East Java Province was delayed because of the "Acceleration Process for Equalization of Positions in the Regional Government Environment" agenda by the Ministry of Home Affairs as stated in a Circular from the Ministry of Home Affairs Number 800/6078/OTDA. This process requires coordination

Keywords: *sanitation, local government, institutions*

Abstrak

Pengelolaan sanitasi menjadi bagian penting untuk keberlanjutan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk hal tersebut infrastruktur instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sanitasi. Untuk optimal dan berkelanjutan IPLT maka perlu pemisahan fungsi regulator dan operator pengelola bidang sanitasi melalui pengembangan kelembagaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD).

Fokus pembahasan artikel ini pada analisis pengembangan kelembagaan UPTD untuk pengelolaan Prasarana IPLT Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Hasil penelitian adalah pengembangan kelembagaan berjalan sesuai SE Kemendagri No 061/4338/OTDA tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD namun demikian, pada proses konsultasi KA UPTD PALD Kabupaten Ponorogo pada Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur tertunda karena adanya agenda “Akselerasi Proses Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemertintah Daerah” oleh Kemendagri sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/6078/OTDA. Pada proses ini perlu koordinasi

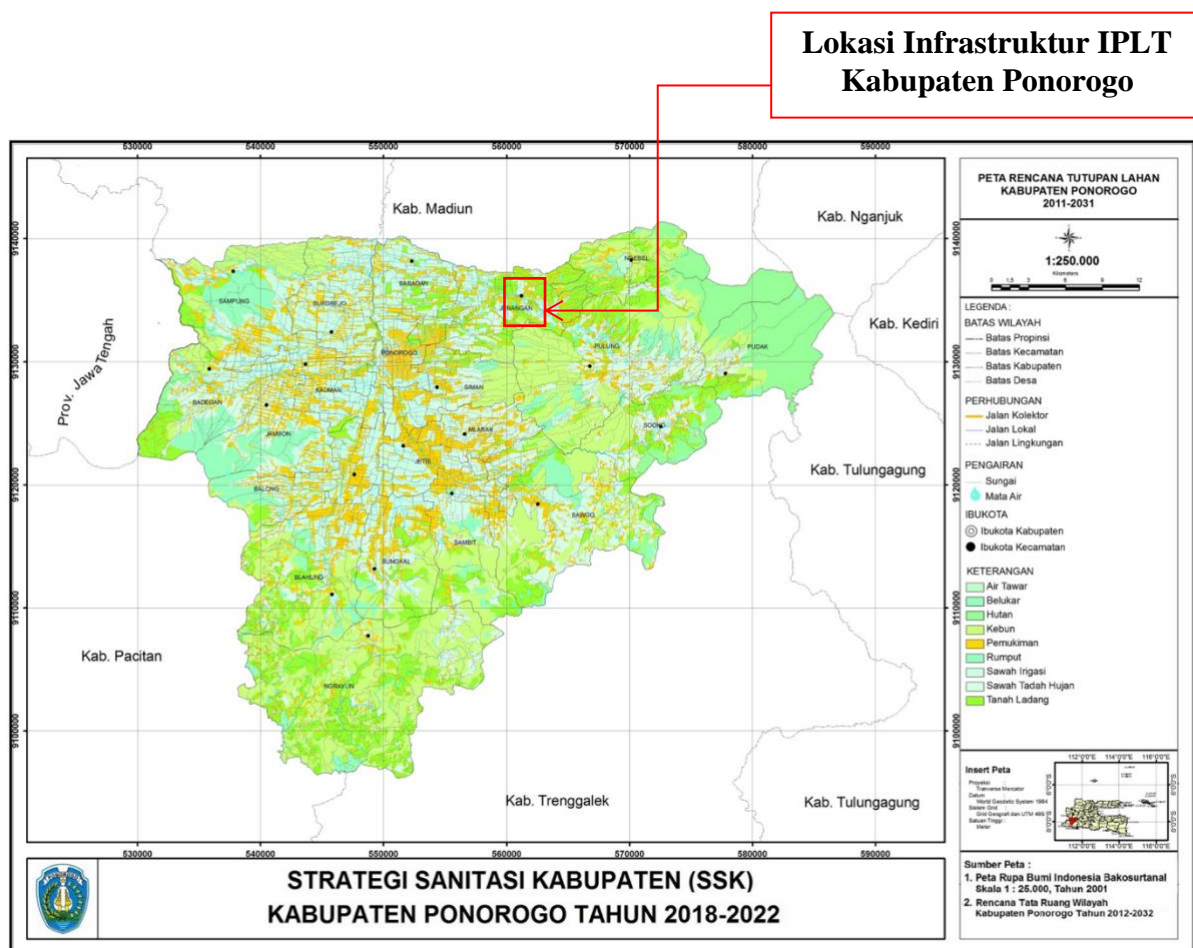
Kata kunci: sanitasi, pemerintah lokal, kelembagaan

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sanitasi. Secara kelembagaan untuk dapat melakukan pelayanan sanitasi secara optimal dan berkelanjutan perlu adanya pemisahan fungsi regulator dan operator pengelola bidang sanitasi. Peningkatan kualitas lingkungan melalui pengelolaan air limbah domestik lumpur tinja merupakan variabel penting dalam upaya memberi pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia. Pada sustainable development goals (SDGs) di bidang lingkungan adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal terhadap air bersih dan sanitasi. Secara spesifik dalam SDGs 6.2 disebutkan pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan (<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-6/>). Faktor tata kelola utama yang diidentifikasi dari kerangka teoretis dan analitis untuk tata kelola dan analisis kelembagaan (Scott, 2014; Harris et al., 2011; Ostrom, 2005) adalah: konteks (faktor struktural/eksogen); institusi (aturan main); aktor/stakeholder dan insentif; dan driver dan hambatan (Chong et al., 2016). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tata kelola ini dalam konteks pemberian layanan sanitasi, fokus utama penelitian ini adalah dinamika di dalam pengembangan kelembagaan UPTD untuk pengelolaan Prasarana IPLT Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo berdasarkan kondisi eksisting telah dibangun IPLT yang berlokasi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan luas area 2,5 ha yang dibangun pada tahun 2017 dan 31 Januari 2018 telah dilaksanakan serah terima *Free Hand Open* (PHO) dari Satker PSPLP Jawa Timur kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Infrastruktur IPLT saat pada tahun 2021 dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Kabupaten Ponorogo. Lokasi IPLT dengan pusat kota Kabupaten Ponorogo berjarak sekitar 9,6 km. Peta Lokasi infrastruktur IPLT Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1 Lokasi Infrastruktur IPLT Kabupaten Ponorogo

Sumber: RTRW Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 dalam SSK Kabupaten Ponorogo 2018-2022, hal II-2

Pengelolaan air limbah domestik lumpur tinja merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat karena kalau tidak dikelola akan mencemari lingkungan. Hal ini karena,

setiap hari manusia menghasilkan sisa buangan metabolisme tubuh berupa tinja. Jumlah volume limbah domestik tinja sejalan dengan jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah. Untuk optimalisasi layanan dan keberkelanjutan prasarana IPLT maka perlu pemisahan fungsi regulator dan operator pengelola bidang sanitasi melalui pengembangan kelembagaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Fokus pembahasan artikel ini pada analisis pengembangan kelembagaan UPTD untuk pengelolaan Prasarana IPLT Kabupaten Ponorogo tahun 2021.

Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka digunakan metode kualitatif. Proses pengumpulan data melalui wawancara, focus group discussion, data sekunder, dan dokumentasi. Analisis Data dilakukan secara kualitatif model interaktif melalui membandingkan antara fakta yang terjadi di lapangan dengan berbagai literatur dan teori yang relevan.

Deskripsi Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu diantara 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Ponorogo memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalur primer jalur lintas selatan dan jalan provinsi Madiun-Ponorogo-Pacitan. Ibukota Kabupaten Ponorogo berjarak 198 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111°7' hingga 111°52' Bujur Timur dan 7°49' hingga 8°20' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.371,78 km², atau menempati sekitar 3,5% (tiga setengah persen) luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 307 desa/kelurahan, 1.002 dusun/lingkungan, 2.274 Rukun Warga (RW) dan 6.869 Rukun Tetangga (RT). Batas wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk

Sebelah Timur: Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek

Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan

Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri

Berikut adalah data jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo yang terdokumentasi dalam Kabupaten Ponorogo Dalam Angka Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 1
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020
		Annual Population Growth Rate (%) 2019–2020
(1)	(2)	(3)
1 Ngrayun	59,79	0,74
2 Slahung	53,36	0,77
3 Bungkal	38,16	1,05
4 Sambit	39,63	1,05
5 Sawoo	60,86	1,04
6 Sooko	23,92	0,92
7 Pudak	9,16	0,29
8 Pulung	51,58	1,12
9 Mlarak	35,04	-0,30
10 Siman	48,05	1,39
11 Jetis	31,22	0,70
12 Balong	47,05	1,21
13 Kauman	46,42	1,45
14 Jambon	45,77	1,58
15 Badegan	33,02	1,24
16 Sampung	39,84	1,03
17 Sukorejo	57,59	1,46
18 Ponorogo	76,69	0,30
19 Babadan	70,41	1,14
20 Jenangan	60,69	1,60
21 Ngebel	21,07	0,96
Kabupaten Ponorogo	949,32	1,01

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2021: hal 42.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan hitungan angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan tabel 1.1 diatas pada tahun 2019-2020 laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Ponorogo 1,01%. Kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo rata-rata per km² adalah 692 pada tahun 2020. Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Ponorogo dengan 3.438. Pada sisi lain kepadatan terendah adalah Kecamatan Pudak 187 per km².

Kebijakan Tata Kelola Air Limbah Domestik Kabupaten Ponorogo

Kebijakan dan program yang selama ini telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk pengelolaan ALD diantaranya adalah membangun IPLT Tahun 2017 (dibantu anggaran APBN Pemerintah pusat), membangun infrastruktur air limbah yang bersifat komunal pada beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo berupa Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) melalui program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Berikut data sebaran SLBM, KMS dan SANIMAS Kabupaten Ponorogo yang dibangun pada rentang waktu 2011-2019:

Tabel 2
Lokasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
SLBM, KMS dan SANIMAS Kabupaten Ponorogo 2011-2019

NO.	NAMA IPAL	LOKASI		INSTANSI YANG MEMBANGUN	PENGADAAN		KAPASITAS
		ALAMAT LENGKAP	KOTA/KABU PATEN		TAHUN ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	SLBM Desa Kedungbanteng	Desa Kedungbanteng Kec. Sukorejo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2011	DAK + DAU	200 jiwa
2	SLBM Desa Gelang Ior	Desa Gelang Ior Kec. Sukorejo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2011	DAK + DAU	200 jiwa
3	SLBM Desa Kranggan	Ds. Kranggan Kec. Sukorejo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2012	DAK + DAU	200 jiwa
4	SLBM Desa Prajegan	Ds. Prajegan Kec. Sukorejo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2013	DAK + DAU	200 jiwa
5	SLBM Ds. Gegeran	Ds. Gegeran Kec. Sukorejo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2014	DAK + DAU	200 jiwa
6	SLBM Ds. Sukorejo	Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2015	DAK + DAU	200 jiwa
7	SLBM Ds. Bangunrejo	Ds. Bangunrejo Kec. Sukorejo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2015	DAK + DAU	200 jiwa
8	SLBM Ds. Bangunrejo	Ds. Bangunrejo Kec. Sukorejo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2017	DAK	200 jiwa
9	KSM PASAR DESA BANGUNREJO	Ds. Bangunrejo Kec. Sukorejo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2018	DAK	200 jiwa
10	KSM AN-NAJIYAH BAROKAH	Ds. Lengkong Kec. Sukorejo	Kab. Ponorogo	Bidang PKP Dinas Perumahan dan	2019	DAK	200 jiwa
11	SLBM Desa Tulung	Ds. Tulung Kec. Sampung	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2012	DAK + DAU	200 jiwa
12	SLBM Desa Kunti	Ds. Kunti Kec. Sampung	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2013	DAK + DAU	200 jiwa
13	SLBM Desa Menang	Ds. Menang Kec. Jambon	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2012	DAK + DAU	200 jiwa
14	SLBM Ds. Sendang	Ds. Sendang Kec. Jambon	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2015	DAK + DAU	200 jiwa
15	SLBM Ds. Karang	Ds. Karang Kec. Badegan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2015	DAK + DAU	200 jiwa
16	SLBM Ds. Karang	Ds. Karang Kec. Badegan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2017	DAK	200 jiwa
17	KSM PONPES HASAN MUNADI	Ds. Karang Kec. Badegan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2018	DAK	200 jiwa
18	SLBM Ds. Ngumpul	Ds. Ngumpul Kec. Balong	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2014	DAK + DAU	200 jiwa
19	SLBM Ds. Tatung	Ds. Tatung Kec. Balong	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2017	DAK	200 jiwa

JGAR. Volume 2 No 2 December 2021 / Yuanita, dkk. / Pengelolaan Sanitasi Pada Pemerintah Lokal

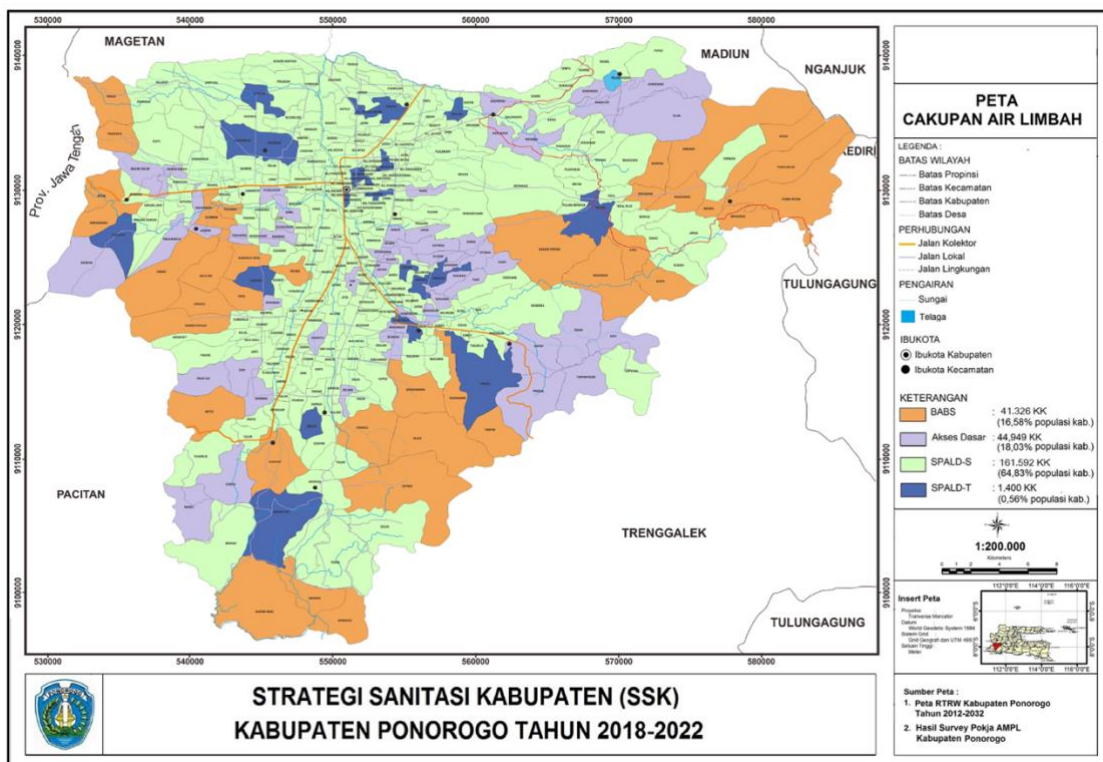
20	KSM TATUNG BERKARYA	Ds. Tatung Kec. Balong	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2018	DAK	200 jiwa
21	SLBM Desa Tugurejo	Ponpes Darul hasanah Ds. Tugurejo Kec. Slahung	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2011	DAK + DAU	200 jiwa
22	KSM SEKAR TANJUNG	Ds. Tugurejo Kec. Slahung	Kab. Ponorogo	Bidang PKP Dinas Perumahan dan	2019	DAK	200 jiwa
23	SLBM Desa Kalisat	Ds. Kalisat Kec. Bungkal	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2012	DAK + DAU	200 jiwa
24	SLBM Ds. Bekare	Ds. Bekare Kec. Bungkal	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2016	DAK	200 jiwa
25	SLBM Ds. Campurejo	Ds. Campurejo Kec. Sambit	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2016	DAK	200 jiwa
26	SLBM Ds. Grogol	Ds. Grogol Kec. Sawoo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2016	DAK	200 jiwa
27	KSM BLUMBANG MANDIRI	Ds. Pangkal Kec. Sawoo	Kab. Ponorogo	Bidang PKP Dinas Perumahan dan	2019	DAK	200 jiwa
28	SLBM Desa Nglumpang	Ponpes Muqodasah Ds. Nglumpang Kec. Mlarak	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2011	DAK + DAU	200 jiwa
29	SLBM Ds. Joresan	Ds. Joresan Kec. Mlarak	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2014	DAK + DAU	200 jiwa
30	SLBM Ds. Siwalan	Ds. Siwalan Kec. Mlarak	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2015	DAK + DAU	200 jiwa
31	SLBM Ds. Joresan	Ds. Joresan Kec. Mlarak	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2016	DAK	200 jiwa
32	SLBM Ds. Tegalsari	Ds. Tegalsari Kec. Jetis	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2016	DAK	200 jiwa
33	SLBM Ds. Binade	Ds. Binade Kec. Ngrayun	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2017	DAK	200 jiwa
34	KSM BINA SANITASI	Ds. Binade Kec. Ngrayun	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2018	DAK	200 jiwa
35	SLBM Kel. Ronowijayan	Kel. Ronowijayan Kec. Siman	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2012	DAK + DAU	200 jiwa
36	SLBM Kel. Pinggirsari	Kel. Pinggirsari Kec. Ponorogo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2012	DAK + DAU	200 jiwa
37	SLBM Desa Bangunsari	Ds. Bangunsari Kec. Ponorogo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2013	DAK + DAU	200 jiwa
38	SLBM Kel. Tonatan	Kel. Tonatan Kec. Ponorogo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2014	DAK + DAU	200 jiwa
39	SLBM Ds. Patihan Wetan	Ds. Patihan Wetan Kec. Ponorogo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2014	DAK + DAU	200 jiwa
40	SLBM Kel. Nologaten	Kel. Nologaten Kec. Ponorogo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2015	DAK + DAU	200 jiwa
41	SLBM Kel. Pakunden	Kel. Pakunden Kec. Ponorogo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2015	DAK + DAU	200 jiwa
42	SLBM Ds. Banyudono	Ds. Banyudono Kec. Ponorogo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2016	DAK	200 jiwa
43	SLBM Kel. Paju	Kel. Paju Kec. Ponorogo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2017	DAK	200 jiwa

44	KSM JATI MULYO	Kel. Paju Kec. Ponorogo	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2018	DAK	200 jiwa
45	KSM INDAH	Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo	Kab. Ponorogo	Bidang PKP Dinas Perumahan dan	2019	DAK	200 jiwa
46	KSM SUMULWO SEHAT	Kel. Banyudono Kec. Ponorogo	Kab. Ponorogo	Bidang PKP Dinas Perumahan dan	2019	DAK	200 jiwa
47	SANIMAS Desa Pulung	Desa Pulung Kec. Pulung	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2015	APBD	200 jiwa
48	SLBM Desa. Munggun	Desa Munggun Kec. Pulung	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2017	DAK	200 jiwa
49	KSM AL MUTTAQIN	Desa Munggun Kec. Pulung	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2018	DAK	200 jiwa
50	KSM MARGO TIRTO	Desa Plunturan Kec. Pulung	Kab. Ponorogo	Bidang PKP Dinas Perumahan dan Kawasan	2019	DAK	200 jiwa
51	SANIMAS Desa Baosan Lor	Desa Baosan Lor Kec. Ngrayun	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum	2016	APBD	200 jiwa
52	SLBM Desa Sukosari	Pasar Sukosari Ds. Sukosari Kec. Babadan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2011	DAK + DAU	200 jiwa
53	SLBM Desa Cekok	Ds. Cekok Kec. Babadan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2012	DAK + DAU	200 jiwa
54	SLBM Ds. Pondok	Ds. Pondok Kec. Babadan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2014	DAK + DAU	200 jiwa
55	SLBM Ds. Patihan Wetan	Ds. Patihan Wetan Kec. Babadan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2016	DAK	200 jiwa
56	SLBM Ds. Pondok	Ds. Pondok Kec. Babadan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2017	DAK	200 jiwa
57	SLBM Ds. Kadipaten	Ds. Kadipaten Kec. Babadan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2017	DAK	200 jiwa
58	SANIMAS Kel. Kadipaten	Kel. Kadipaten Kec. Babadan	Kab. Ponorogo	Bidang Perumahan dan Kawasan	2017	APBD	200 jiwa
59	KSM BIMA SAKTI	Ds. Pondok Kec. Babadan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2018	DAK	200 jiwa
60	KSM PP. MAMBAUL HISAN	Kel. Kadipaten Kec. Babadan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2018	DAK	200 jiwa
61	SLBM Desa Mrican	Ds. Mrican Kec. Jenangan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2013	DAK + DAU	200 jiwa
62	SLBM Desa Pintu	Ds. Pintu Kec. Jenangan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2013	DAK + DAU	200 jiwa
63	SLBM Ds. Panjeng	Ds. Panjeng Kec. Jenangan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2016	DAK	200 jiwa
64	SLBM Ds. Mrican	Ds. Mrican Kec. Jenangan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2017	DAK	200 jiwa
65	KSM HIDAYATUL MUBTADI'IN	Ds. Mrican Kec. Jenangan	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2018	DAK	200 jiwa
66	SANIMAS Plalangan	Desa Plalangan Kec. Jenangan	Kab. Ponorogo	Bidang Perumahan dan Kawasan	2018	APBD	200 jiwa
67	SLBM Desa Ngebel	Pasar Pabrik Ngebel Kec. Ngebel	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2011	DAK + DAU	200 jiwa
68	KSM NGARAYUN SEJAHTERA	Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun	Kab. Ponorogo	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan	2019	DAK	200 jiwa

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo, Th 2020

Berdasarkan data SLBM, KMS dan SANIMAS Kabupaten Ponorogo terdapat 68 titik yang dibangun pada rentang waktu tahun 2011-2019. Jumlah populasi kabupaten dalam pengelolaan sanitasi air limbah dapat dilihat pada gambar peta akses cakupan air limbah domestik *black water* seperti dalam tabel 1.6 dan gambar 1.9 peta cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik Kabupaten Ponorogo (informasi terdapat dalam

Instrumen SSK lembar kerja” Form 2”, peta cakupan layanan air limbah digambarkan bahwa Kabupaten Ponorogo saat ini akses layanan pengelolaan air limbah domestik adalah meliputi; BABS sebesar 16,58% atau 41.326 KK, akses dasar sebesar 18,03% atau 44.949 KK, SPALD-S (meliputi setempat individual, sharing, sistem komunal dengan sarana prasarana berupa MCK dan MCK++) sebesar 65,83% atau 161.592 KK dan SPALD-T (seistem terpusata yaitu berupa IPAL Komunal, MCK Kombinasi dan IPAL Kawasan) sebesar 0,56% atau 1400 KK disamapaikan sebagai berikut:



Gambar 2 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik
Sumber : POKJA AMPL Dinas Terkait (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Dinkes Kabupaten Ponorog tahun 2017 (dalam SSK Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 hal II-35)

Tabel 3
Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini Di Kabupaten Ponorogo Untuk
Klasifikasi Wilayah Perdesaan

No	Kecamatan	Jumlah penduduk Perdesaan (KK)	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Layak					
			BABS (KK)	Cubluk / Tangki Septik Individual Tidak Layak (KK)	SPALD-S		SPALD-T			
					Skala Individual	Skala Komunal	IPALD Permukiman		SPALD-T Perkotaan	SPALD-T Kawasan Tertentu
						Berbasis Masyarakat	Berbasis Institusi			
1	Slahung	14.120	1.805	3.886	8.299	131	-	-	-	-
2	Ngrayun	15.997	5.770	5.539	2.959	1.676	50	-	-	-
3	Bungkal	10.216	948	1.359	5.606	2.253	50	-	-	-
4	Sambit	10.556	3.063	3.255	2.877	1.311	50	-	-	-
5	Sawoo	16.594	3.020	5.530	7.541	453	50	-	-	-
6	Sooko	6.305	1.949	806	3.131	419	-	-	-	-
7	Pulung	13.804	3.311	1.757	8.052	634	50	-	-	-
8	Mlarak	9.634	1.294	5.440	2.272	228	150	-	-	250
9	Jetis	8.556	-	1.443	6.824	239	50	-	-	-
10	Siman	9.961	300	2.443	6.956	261	-	-	-	-
11	Balong	12.326	2.291	243	9.700	42	50	-	-	-
12	Kauman	12.311	974	2.684	8.078	575	-	-	-	-
13	Badegan	8.857	2.119	1.579	5.038	71	50	-	-	-
14	Sampung	11.167	1.839	1.713	7.371	244	-	-	-	-
15	Sukorejo	14.907	1.452	1.002	9.391	2.912	150	-	-	-
16	Babadan	13.173	20	353	12.171	580	50	-	-	-
17	Ponorogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Jenangan	13.171	1.178	2.216	9.526	202	50	-	-	-
19	Ngebel	5.653	156	1.650	2.780	1.067	-	-	-	-
20	Jambon	12.326	7.701	378	4.116	81	50	-	-	-
21	Pudak	2.338	1.647	-	597	94	-	-	-	-
Jumlah		221.970	40.837	43.276	123.285	13.473	850	-	-	250

Sumber : Data Sekunder Pokja SKPD Terkait (Dinas PKP dan Dinkes) Kabupaten Ponorogo tahun 2016 (dalam SSK Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 hal II-36)

Tabel 4
Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Ponorogo Untuk
Klasifikasi wilayah Perkotaan

No	Kecamatan	Jumlah penduduk Perkotaan	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Layak					
			BABS (KK)	Cubluk / Tangki Septik Individual Tidak Layak (KK)	SPALD-S		SPALD-T			
					Skala Individual	Skala Komunal	IPALD Permukiman		SPALD-T Perkotaan	SPALD-T Kawasan Tertentu
						Berbasis Masyarakat	Berbasis Institusi			
1	Slahung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ngrayun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bungkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sambit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sawoo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sooko	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pulung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Mlarak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Siman	1.950	69	333	1.392	155	-	-	-	-
11	Balong	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kauman	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badegan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sukorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Babadan	4.501	-	133	4.162	105	100	-	-	-
17	Ponorogo	18.580	6	1.021	16.732	621	200	-	-	-
18	Jenangan	2.268	414	186	1.647	20	-	-	-	-
19	Ngebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Jambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pudak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		27.297	489	1.673	23.933	901	300	-	-	-

Sumber : Data Sekunder Pokja SKPD Terkait (Dinas PKP dan Dinkes) Kabupaten Ponorogo tahun 2016 (dalam SSK Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 hal II-37)

Cakupan layanan air limbah Kabupaten Ponorogo untuk wilayah perdesaan disampaikan bahwa jumlah penduduk total adalah 221.970 KK akses layanan pengelolaan air limbah domestiknya meliputi; BABS sejumlah 40.837 KK, akses dasar sebesar 43.276 KK, SPALD-S meliputi sistem setempat individual sebesar 123.285 KK, setempat komunal dengan sarana prasarana berupa MCK dan MCK++ sebesar 13.473 KK dan SPALD-T berupa SPALD permukiman hanya pada berbasis masyarakat dengan sarana IPAL Komunal dan MCK Kombinasi sebesar 850 KK dan untuk SPALD-T perkotaan masih belum ada yang ada adalah SPALD-T kawasan tertentu berupa IPAL Kawasan tertentu sejumlah 250 KK

Pada wilayah perkotaan, cakupan layanan air limbah Kabupaten Ponorogo dengan jumlah penduduk total adalah 27.297 KK akses layanan pengelolaan air limbah domestiknya meliputi; BABS sejumlah 489 KK, akses dasar sebesar 1.673 KK, SPALD-S meliputi sistem setempat individual sebesar 23.933 KK, , setempat komunal dengan sarana prasarana berupa MCK dan MCK++ sebesar 901 KK dan SPALD-T berupa SPALD permukiman hanya pada berbasis masyarakat dengan sarana IPAL Komunal dan MCK Kombinasi sebesar 300 KK dan untuk SPALD-T perkotaan dan SPALD-T kawasan tertentu masih belum ada di wilayah perkotaan Ponorogo.

Kondisi sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik kabupaten Ponorogo berdasarkan tabel kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik bahwa di Kabupaten Ponorogo ada SPALD setempat skala komunal yaitu MCK/MCK++ sebanyak 68 unit dan dibangun tahun 2011-2019 dengan kondisi masih berfungsi dan ada SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat berupa IPAL Komunal dan IPAL Kombinasi sebanyak 23 unit dibangun tahun 2014-2016 dan kondisi masih berfungsi. Berikut tabel kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik kabupaten Ponorogo lebih jelas disampaikan kondisinya:

Tabel 5
Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

No.	Jenis	Satuan	Jumlah /Kapasitas	Kondisi		Keterangan
				Berfungsi	Tidak Berfungsi	
SPAL Setempat (Sistem On- Site)						
1.	SPALD-S Skala Individual	Unit	-	-	-	Data Unit tidak tersedia Hanya data KK dari STBM org
2.	SPALD-S Skala Komunal (MCK/MCK++)	Unit	19	Berfungsi	-	Kawasan Permukiman/pasarPonpes dan Pasar (DAK SLBM dan SANIMAS)
SPAL Terpusat (Sistem Off- Site)						
	SPALD-T skala permukiman :					
1	MCK Kombinasi	Unit	14	Berfungsi	-	-
2.	IPAL Komunal	Unit	9	Berfungsi	-	-
3.	IPAL Kawasan	Unit	1	Berfungsi		Kawasan Pondok Gontor
4.	IPAL Terpusat	Unit	-	-	-	-
Pengolahan Lumpur Tinja						
1	Truk Tinja	Unit	2	Berfungsi	-	Ada Truck Tinja swasta tapi belum teridentifikasi oleh Dinas LH
2	IPLT : Kapasitas	25 m3/hari	1	Berfungsi	-	IPLT Mrican Kecamatan Jenanga Ponorogo

Sumber : Pokja AMPL SKPD terkait Dinas PKP dan Dinas LH (dalam SSK Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 hal II-40)

Keterangan :

IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Berdasarkan data sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) tabel 1.9 diatas, terdapat sebagian wilayah kecamatan yang perlu ditingkatkan. Diperlukan langkah-langkah inovatif untuk mewujudkan SDGs dalam mewujudkan sanitasi berkelanjutan

Tabel 6
Capaian Pengelolaan Air Limbah SPALD-S dan SPALD-T Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TARGET TAHUN 2020				REALISASI TAHUN 2020				
			TOTAL	AKSES DASAR/AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TOTAL	AKSES DASAR/AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	BABADAN		20628	686	19.682	260	15.868	528	15.140	200	
2	BADEGAN		10824	1.892	8.867	65	8.326	1.455	6.821	50	
3	BALONG		12247	767	11.415	65	9.421	590	8.781	50	
4	BUNGKAL		10126	702	9.359	65	7.789	540	7.199	50	
5	JAMBON		14070	1.253	12.752	65	10.823	964	9.809	50	
6	JENANGAN		20115	2.648	17.142	325	15.473	2.037	13.186	250	
7	JETIS		12071	2.366	9.640	65	9.285	1.820	7.415	50	
8	KAUMAN		16012	3.293	12.719	0	12.317	2.533	9.784		
9	MLARAK		12100	3.463	8.507	130	9.308	2.664	6.544	100	
10	NGEBEL		6809	2.491	4.254	65	5.238	1.916	3.272	50	
11	NGRAYUN		20112	8.744	11.174	195	15.471	6.726	8.595	150	
12	PONOROGO		17813	0	17.488	325	13.702	0	13.452	250	
13	PUDAK		2129	0	2.129	0	1.638	0	1.638		
14	PULUNG		13482	2.477	10.811	195	10.371	1.905	8.316	150	
15	SAMBIT		14187	5.529	8.593	65	10.913	4.253	6.610	50	
16	SAMPUNG		13798	3.398	10.335	65	10.614	2.614	7.950	50	
17	SAWOO		23015	4.745	18.140	130	17.704	3.650	13.954	100	
18	SIMAN		13159	85	13.009	65	10.122	65	10.007	50	
19	SLAHUNG		21048	4.320	16.663	65	16.191	3.323	12.818	50	
20	SOOKO		7201	1.589	5.547	65	5.539	1.222	4.267	50	
21	SUKOREJO		12349	692	11.332	325	9.499	532	8.717	250	
TOTAL			293296	11429,6	64691,9	650	225.612	39337	184275	2000	
			PERSENTASE LAYANAN				76,92%	344,17%	284,85%	307,69%	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 (diolah).

Berdasarkan tabel diatas diketahui pada tahun 2020 presentase layanan 76,92%. Pada sebagian besar wilayah capainnya mendekati antara target dan realisasi.

Analisis Pengembangan Kelembagaan UPTD untuk Pengelolaan Prasarana IPLT Kabupaten Ponorogo

Fokus pembahasan artikel ini pada analisis pengembangan kelembagaan pengelolaan Prasarana IPLT Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Upaya optimal dan berkelanjutan prasarana IPLT maka langkah pemisahan fungsi regulator dan operator pengelola bidang sanitasi dilakukan melalui pengembangan kelembagaan berupa unit pelaksana teknis dinas (UPTD).

Stakeholder yang terlibat dalam Tim Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Prasarana IPLT

Stakeholder yang terlibat pengembangan kelembagaan adalah perwakilan dari lembaga sebagai berikut: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Ponorogo; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ponorogo; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo; Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ponorogo; Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo; Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Ponorogo No 188.45/899/405.20/2021.

Proses pengembangan kelembagaan digunakan pedoman sesuai SE Kemendagri No 061/4338/OTDA tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD yang hasilnya diringkas sebagai berikut:

Tabel 7
Ringkasan Cek list Kriteria Persyaratan Pembentukan UPTD PALD
Kabupaten Ponorogo

No	Kriteria	Indikator	Alat Uji Validitas	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang	Urusan yang menjadi kewenangan daerah	Lampiran UU 23 /2014	Kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.
		Bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan	Lihat hasil kerja dalam kajian	Tugas UPTD PALD: a.Pelaksana teknis operasional pengolahan dan pemrosesan lumpur tinja di IPLT b.Pelaksana kebijakan operasional sarana dan prasarana IPLT.
		Bukan merupakan kegiatan lintas OPD	Lihat hasil kerja dalam kajian	UPTD PALD melaksanakan sebagian tugas teknis operasional sub urusan air limbah domestik dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kawasan Permukiman (Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 139 Tahun 2019 Paragraf 7, Pasal 30 Ayat 1), Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 139 Tahun 2019 Pasal 34).
		Memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan/atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya	Lihat hasil kerja dalam kajian	Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo merupakan regulator dan UPTD PALD Kabupaten Ponorogo sebagai operator IPLT sebagian tugas teknis operasional Dinas PUPKP Bidang Kawasan Permukiman (Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 139 Tahun

				2019 Paragraf 7, Pasal 30 Ayat 1), Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 139 Tahun 2019 Pasal 34).
2	Penyediaan Barang atau Jasa yang diperlukan masyarakat atau perangkat daerah lain	Barang atau jasa yang diberikan bersifat konkrit dan terukur baik barang/jasa kolektif maupun barang/jasa individu	Lihat hasil kerja dalam kajian	Jasa UPTD PALD adalah: a.Penyedotan lumpur tinja – penyedotan dilakukan secara on call dan atau secara layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2); b.membawa lumpur tinja dari warga-kantor pemerintah-sekolah –MCK++ sanimas ke IPLT dengan truk sedot tinja; c.pengolahan dan pemrosesan lumpur tinja pada IPLT Kabupaten Ponorogo dengan kapasitas 12,5 M3/hari atau 4 truk/hari dengan rata-rata kapasitas truk 3 m ³ yang mampu melayani 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo.
		Penyediaan barang dan jasa diperlukan secara terus menerus	Lihat frekuensi dan volume produk layanan	Layanan operasional yang dilakukan UPTD PALD Kabupaten Ponorogo diperlukan terus menerus setiap hari. Program layanan lumpur tinja dapat menerapkan sistem layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) dimana penjadwalan penyedotan disetiap rumah perlu dikelola optimal.
3	Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan	Layanan kepada masyarakat menjadi cepat dan efektif	Bandingkan waktu dan biaya layanan	Optimalisasi operasional IPLT Kabupaten Ponorogo dengan operator UPTD PALD Kabupaten Ponorogo untuk mendekatkan layanan publik bidang sanitasi khususnya pengelolaan lumpur tinja kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo. Pengembangan lembaga UPTD PALD berkontribusi pada layanan pengelolaan lumpur tinja menjadi dekat, murah dan cepat..
		Layanan yang diberikan UPT tersebut merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat atau penyelenggara pemerintahan	Cek akibat jika layanan itu tdk ada	Lumpur tinja merupakan hasil metabolisme manusia setiap hari. Pada wilayah padat penduduk apabila <i>septic tank</i> penuh akan menjadi persoalan yang dapat mengganggu lingkungan hidup dan manusia sekitarnya. Berdasarkan pemikiran tersebut layanan UPTD PALD dibutuhkan masyarakat Ponorogo.
		Layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, SWASTA, atau Penyedia lainnya	Cek fungsi layanan publik atau layanan privat	Layanan IPLT di Kabupaten Ponorogo belum disediakan oleh BUMN, BUMD, dan Swasta. Berdasarkan hal tersebut, UPTD PALD yang mengelola IPLT penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan.
4	Tersedia sumber daya	Pegawai yang akan ditempatkan pada	Cek jumlah pegawai pada	SDM UPTD PALD berjumlah 9 orang yang berasal dari PNS Dinas PUPKP

	yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana	UPT tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit-unit organisasi yang lain	unit kerja yang pegawainya ditugaskan ke UPT	Kabupaten Ponorogo dan tenaga harian lepas.
		Tidak menambah pegawai baru baik PNS ataupun Honorer	Cek jumlah pegawai yang dibutuhkan	UPTD PALD Kabupaten Ponorogo tidak akan menambah SDM baru baik PNS maupun Honorer. SDM UPTD PALD Kabupaten Ponorogo akan mengoptimalkan SDM eksisting yaitu 6 orang pegawai tidak tetap saat ini bertugas mengoperasional IPLT dan tiga jabatan baru yaitu kepala UPTD PALD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan yang direncanakan berasal dari SDM PNS yang ada di Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo.
		Belanja Pegawai dan biaya operasional kantor tidak mengurangi belanja publik	Cek rasio belanja pegawai dengan belanja non pegawai	Belanja pegawai UPTD PALD tidak mengurangi belanja publik. penambahan anggaran belanja pegawai sebelum dan setelah pembentukan lembaga UPTD PALD Dinas PUPKP adalah 2,228% - 2,313% = 0,084%. sehingga nilai tersebut berada dibawah 0,5% sehingga dapat diartikan bahwa pembentukan UPTD PALD Kabupaten Ponorogo yang menginduk pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Ponorogo dapat direalisasikan
		Tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa kantor dan perlengkapannya	Cek daftar sarana yang akan digunakan	Pembentukan UPTD PALD telah tersedia sarana dan prasarana berupa kantor dan perlengkapannya.
5	Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu	Dukumen SOP sudah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah	Cek No SK Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Ponorogo tentang SOP UPTD PALD	Dokumen SOP sudah disahkan Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo. (Lampiran Naskah KA tentang SOP UPTD PALD Kabupaten Ponorogo).
6	Tersediaanya jabatan fungsional/ teknis sesuai dengan tugas	Terdapat tenaga teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD	Cek Tenaga Teknis Yang dibutuhkan dan nama tenaga yang tersedia	Tersedia tenaga teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD PALD sesuai kebutuhan.

	dan fungsi UPTD yang bersangkutan		beserta latar belakang pengalaman	
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

Sumber data: primer penelitian, 2021.

Semua kriteria dalam pengembangan kelembagaan sebagaimana diatur pada SE Kemendagri No 061/4338/OTDA tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD dapat dipenuhi. Namun demikian ada kendala pada pada proses konsultasi KA UPTD PALD Kabupaten Ponorogo pada Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur tertunda karena adanya agenda “Akselerasi Proses Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemertintah Daerah” oleh Kemendagri sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/6078/OTDA. Hal ini menunjukkan kurang koordinasi antar kementerian dalam menjalankan program sehingga ada benturan dan menghambat proses birokrasi perogram yang lain.

Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian disimpulkan pembentukan UPTD PALD Kabupaten Ponorogo memenuhi semua kriteria sesuai SE Kemendagri No 061/4338/OTDA tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD. Analisis rasio belanja pegawai, pehitungan penambahan anggaran belanja pegawai sebelum dan setelah pembentukan UPTD PALD pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo adalah 0,084%, angka tersebut berada dibawah 0,5% sehingga dapat diartikan bahwa pembentukan UPTD PALD Kabupaten Ponorogo yang menginduk pada dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo dapat direalisasikan. Namun demikian pada proses konsultasi KA UPTD PALD Kabupaten Ponorogo pada Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur tertunda karena adanya agenda “Akselerasi Proses Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemertintah Daerah” oleh Kemendagri sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/6078/OTDA

Daftar Pustaka

- Bappenas. *6 Air Bersih dan Sanitasi Layak*. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-6/>.
- Chong, J., Abeysuriya, K., Hidayat, L., Sulistio, H., Ross, K. and Willetts, J. (2016). *Strengthening Governance Arrangements for Small City and Town Sanitation*. Report prepared by the Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney, Kemitraan Partnership for Governance Reform and SNV Indonesia for the Australian Aid Indonesia Infrastructure Initiative (IndII).
- Harris, D., Kooy, M. and Jones, L. (2011). *Analysing the Governance and Political Economy of Water and Sanitation Service Delivery*. Working Paper 334. London: Overseas Development Institute.
- Ostrom, E. (2005). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton: Princeton University Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 139 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo
- SE Kemendagri No 061/4338/OTDA tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD
- Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/6078/OTDA
- SE Kemendagri No 061/4338/OTDA tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD
- Scott, W.R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests and Identities*: SAGE Publications.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah